

Prinsip-prinsip hukum Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dasar di Kota Medan: studi kajian pada peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=94233&lokasi=lokal>

Abstrak

[Perubahan paradigma yang panting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah adanya konsistensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum good governance.

Berbagai karakteristik utama good governance merupakan pilar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan stakeholders akan meningkat apabila akuntabilitas publik dari pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Prinsip-prinsip hukum good governance merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala proses dan tingkah laku yang mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara.

Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya, pemerintah bertanggung jawab terhadap program perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Satu bagian program pembangunan adalah bidang pendidikan (dasar) yang telah menjadi kebijakan nasional, serta diimplementasikan pada tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pembahasan mengenai kebijakan anggaran (APBN dan APBD) terkait dengan alokasi anggaran belanja publik dalam pembangunan khususnya bidang pendidikan dasar merupakan suatu kenyataan hukum yang parlu dilakukan kajian secara sistematis dan menyeluruh dalam perspektif good governance.

Berdasarkan data yang diperoleh, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Medan khususnya dalam bidang pendidikan masih terdapat berbagai hambatan. Dengan pemberdayaan dan pendayagunaan kepemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Medan dapat memanfaatkan segala potensi untuk keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

,]